



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO**

Jl. Raya Panglima Sudirman 514 Probolinggo 7215
Telp. (0335) 43455 email: kpuprobolinggokota@gmail.com

Nomor : 13/HM.02/3574/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Penting
Perihal : **Laporan PPID Tahun 2021
KPU Kota Probolinggo.**

Probolinggo, 14 Januari 2022

Kepada:
Yth. Ketua Komisi Informasi
Provinsi Jawa Timur
di
SURABAYA

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik, disebutkan bahwa setiap tahun badan publik wajib mengumumkan layanan informasi yang meliputi: jumlah permintaan informasi yang diterima, waktu yang diperlukan dalam memenuhi permintaan informasi, jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi dan/atau alasan penolakan permintaan informasi. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami kirimkan dengan hormat laporan PPID tahun 2021 KPU Kota Probolinggo, sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas perhatian dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Sdr. Ketua KPU Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
2. Arsip.



**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK (PPID)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2021**



KPU KOTA PROBOLINGGO

JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO. 514

<https://kota-probolinggo.kpu.go.id>

<https://probolinggotappid.kpu.go.id/>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatnya kita dapat menyusun Laporan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Tahun 2021.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan public terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan public sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID KPU Kota Probolinggo akan selalu terus menerus berbenah dalam meningkatkan pelayanannya, mulai dari Penataan/perbaikan dari sisi tampilan dan konten website <https://kota-probolinggo.kpu.go.id> dan yang lebih penting lagi menyediakan sarana, prasarana, fasilitas berupa desk layanan informasi.

Kami berharap dengan disusunnya Laporan Pelayanan Informasi Publik ini dengan sendirinya menggugurkan kewajiban KPU Kota Probolinggo sebagai Badan Publik dalam menyediakan laporan layanan informasi publik. Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik masih terdapat kekurangan, untuk itu diperlukan kritik dan saran dari berbagai pihak. Semoga upaya yang telah dilakukan mendapat Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Probolinggo, 31 Desember 2021



Daftar Isi

| | |
|---|----|
| Halaman Judul | 1 |
| Kata Pengantar | 2 |
| Daftar Isi | 3 |
| A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik | 4 |
| B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik | 5 |
| 1. Sarana dan Prasarana | 5 |
| 2. Sumber Daya Manusia | 6 |
| 3. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi | 9 |
| C. Rincian Pelayanan Informasi | 12 |
| 1. Daftar Rekapitulasi Permohonan Pelayanan Publik tahun 2019 | 12 |
| 2. Daftar Pengajuan Permohonan Pelayanan Informasi Publik tahun 2020 | 12 |
| 3. Daftar Rekapitulasi Permohonan Pelayanan Publik tahun 2020 | 13 |
| 4. Daftar Pengajuan Permohonan Pelayanan Informasi Publik tahun 2021 | 13 |
| 5. Daftar Rekapitulasi Permohonan Pelayanan Publik tahun 2021 | 20 |
| D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi | 21 |
| E. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik | 21 |
| F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi | 21 |
| G. Penutup | 22 |

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang. Hak memperoleh informasi adalah hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari dan memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008 dijelaskan bahwa setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik selain informasi yang dikecualikan. Informasi publik yang bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi yang diberikan kepada masyarakat serta telah mempertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo sebagai salah satu badan publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum berkewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon Informasi Publik. Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo juga wajib menyediakan informasi publik yang akurat benar, dan tidak menyesatkan.

Oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor: 045/03/Kpts/KPU-Kota/014.329449/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan Prasarana

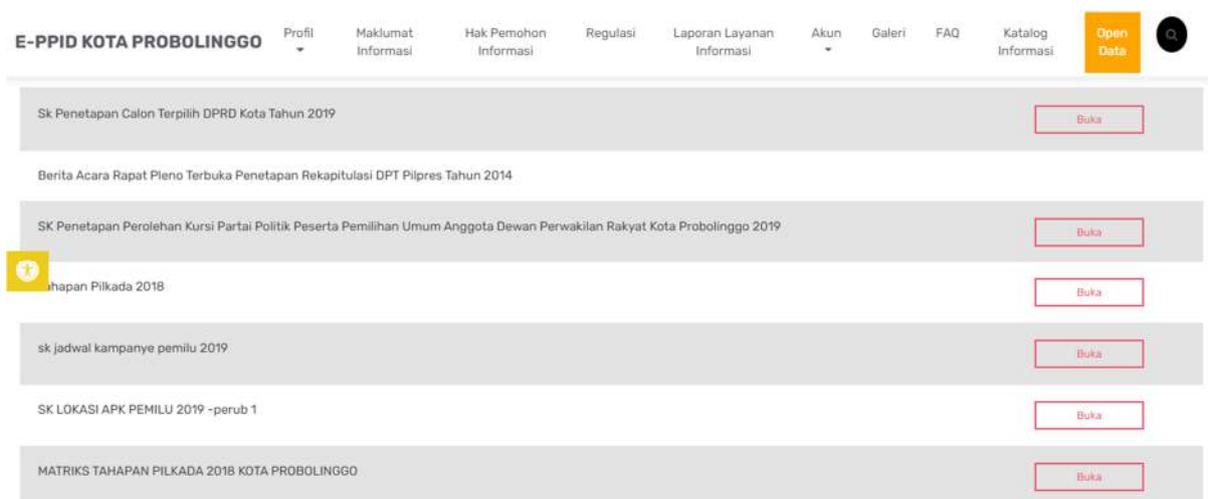
Pelayanan Informasi Publik diselenggarakan oleh PPKI yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo guna mempermudah pelayanan Informasi Publik titik berbagai cara pelayanan yang dilaksanakan oleh PPKI di Kota Probolinggo adalah dengan datang langsung ke kantor KPU Kota Probolinggo Jalan Panglima Sudirman nomor 51 4 Probolinggo atau melalui surat telepon dan faksimile.

Pemohon informasi publik yang datang langsung ke kantor KPU Kota Probolinggo akan mendapatkan Formulir Permohonan Informasi Publik untuk diisi dan diajukan ke PPID. Selain dengan permohonan manual, pemohon informasi publik juga dapat memanfaatkan fasilitas E-PPID KPU RI dalam rangka meminta informasi publik yang dikuasai oleh KPU Kota Probolinggo.

Layanan E-PPID KPU RI ini adalah fasilitas baru yang disediakan dalam rangka memudahkan pemohon informasi publik agar pemohon juga tidak perlu datang langsung ke kantor KPU Kota Probolinggo, dengan menggunakan fasilitas internet untuk berkomunikasi dengan PPID.

Sebagai badan publik, KPU Kota Probolinggo juga menyediakan informasi yang dapat diakses publik tanpa harus memohon atau datang ke kantor KPU Kota Probolinggo. Informasi ini dapat diakses di website KPU Kota Probolinggo.

Di KPU Kota Probolinggo juga tersedia layanan E-PPID walaupun masih terintegrasi ke KPU RI.



The screenshot displays the E-PPID Kota Probolinggo website interface. At the top, there is a navigation menu with the following items: E-PPID KOTA PROBOLINGGO, Profil, Maklumat Informasi, Hak Pemohon Informasi, Regulasi, Laporan Layanan Informasi, Akun, Galeri, FAQ, Katalog Informasi, and an Open Data button. Below the menu, a list of public information items is shown, each with a 'Buka' button to access the data. The items listed are:

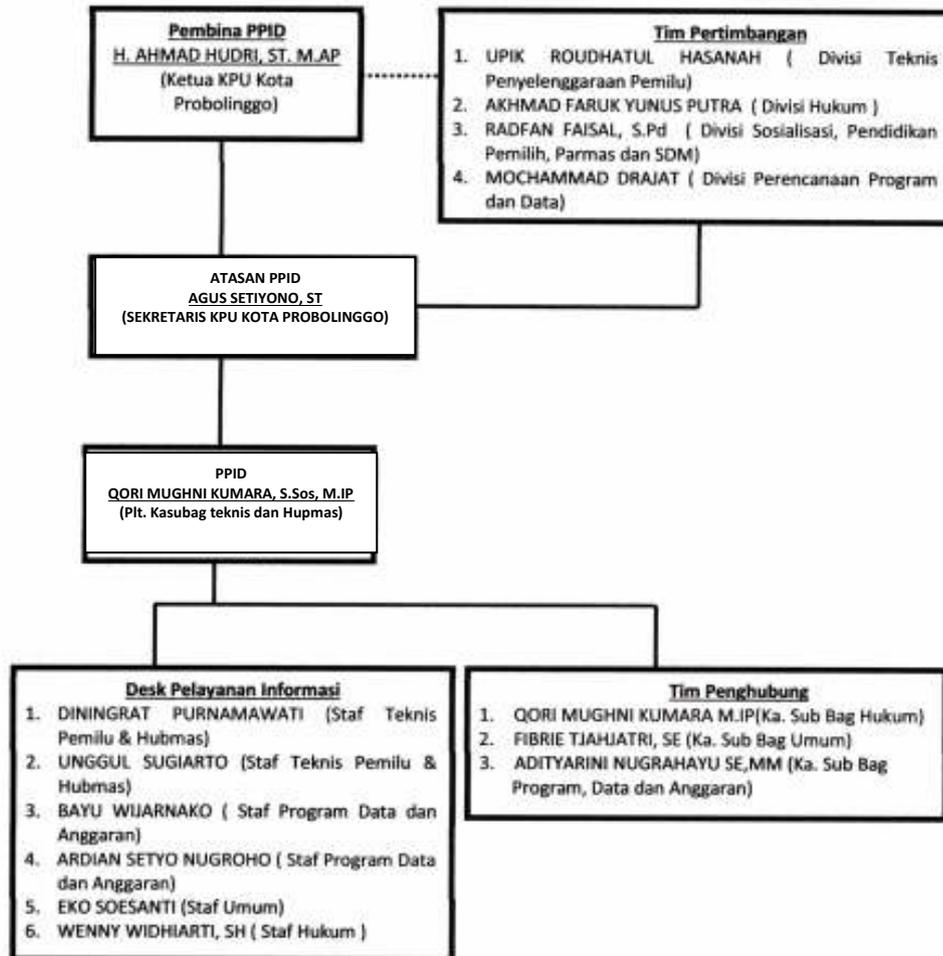
- Sk Penetapan Calon Terpilih DPRD Kota Tahun 2019
- Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi DPT Pilpres Tahun 2014
- SK Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Probolinggo 2019
- Tahapan Pilkada 2018
- sk jadwal kampanye pemilu 2019
- SK LOKASI APK PEMILU 2019 -perub 1
- MATRIKS TAHAPAN PILKADA 2018 KOTA PROBOLINGGO

Data yang sudah tersedia di E-PPID KPU Kota Probolinggo

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam rangka pengelolaan Informasi Publik di KPU Kota Probolinggo, dapat kita uraikan sebagai berikut.

Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)



Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Tahun 2021

| NO | JABATAN DALAM PPID | NAMA | JABATAN DALAM KEDINASAN |
|----|---|--|--|
| 1 | Pembina PPID | H. AHMAD HUDRI, ST | Ketua KPU Kota Probolinggo |
| 2 | Tim Pertimbangan (4 Anggota KPU Kota Probolinggo) | 1. UPIK ROUDHATUL HASANAH (Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu) 2. AKHMAD FARUK YUNUS PUTERA (Divisi Hukum) 3. RADFAN FAISAL (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM) 4. MOCHAMMAD DERAJAT (Divisi Perencanaan Program dan Data) | Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU |
| 3 | Atasan PPID | AGUS SETIONO, ST | Sekretaris KPU Kota Probolinggo |
| 4 | PPID | QORI MUGHNI KUMARA, S.Sos, M.IP | Ka. Sub Bag Teknis Pemilu & Hubmas |
| 5 | Tim Penghubung | 1. QORI MUGHNI KUMARA M.IP 2. FIBRIE TJAHJATRI, SE 3. ADITYARINI NUGRAHAYU SE,MM | Ka. Sub Bag Hukum Ka. Sub Bag Umum Ka. Sub Bag Program, Data dan Anggaran |
| 6 | Desk Pelayanan Informasi | 1. DININGRAT PURNAMAWATI 2. UNGGUL SUGLARTO 3. BAYU WJARNAKO 4. ARDIAN SETYO NUGROHO | Staf Teknis Pemilu Staf Teknis Pemilu Staf Program Data dan Anggaran Staf Program Data dan Anggaran |
| | | 5. EKO SUSANTI 6. WENY WIDHIARTY, SH | Staf Umum Staf Hukum |

Uraian tugas dan kewenangan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID KPU Kota Probolinggo

- a. Pembina
 - 1) menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo.
 - 2) menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo.
 - 3) Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

Berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo.
- c. Atasan PPID
 - 1) Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo.
 - 2) Menyelesaikan masalah yang muncul terkait Manajemen Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo.
 - 3) Mengevaluasi kinerja, struktur, dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo.
 - 4) Memastikan Manajemen Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo telah sesuai dengan peraturan perundangan.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
 - 1) Merencanakan mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan sekretariat KPU Kota Probolinggo.
 - 2) Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan sekretariat KPU Kota Probolinggo.
 - 3) Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari lingkungan sekretariat KPU Kota Probolinggo.
 - 4) Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan.
 - 5) Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama subbagian hukum.

- 6) Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.
- e. Tim Penghubung
 - 1) Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik.
 - 2) Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing subbagian.
 - 3) Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada subbagian hukum pada Sekretariat KPU Kota Probolinggo.
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan informasi dan dokumentasi pada KPU Kota Probolinggo.

3. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi

Setiap penyelenggara badan publik sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing harus memiliki standar pelayanan yang berkaitan dengan prosedur dan waktu sebagai ukuran baku dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan informasi. Adapun standar pelayanan Informasi Publik sebagai berikut.

a. Desk Informasi Publik

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon / pengguna informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen melalui desk layanan informasi publik melakukan layanan langsung dan layanan melalui media, antara lain menggunakan telepon, fax, email dan website sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

b. Waktu Layanan Informasi

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, PPID menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi publik, Di Lingkungan KPU Kota Probolinggo penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat.

Senin-kamis : 09.00-15.00 WIB

Istirahat : 12.00-13.00 WIB

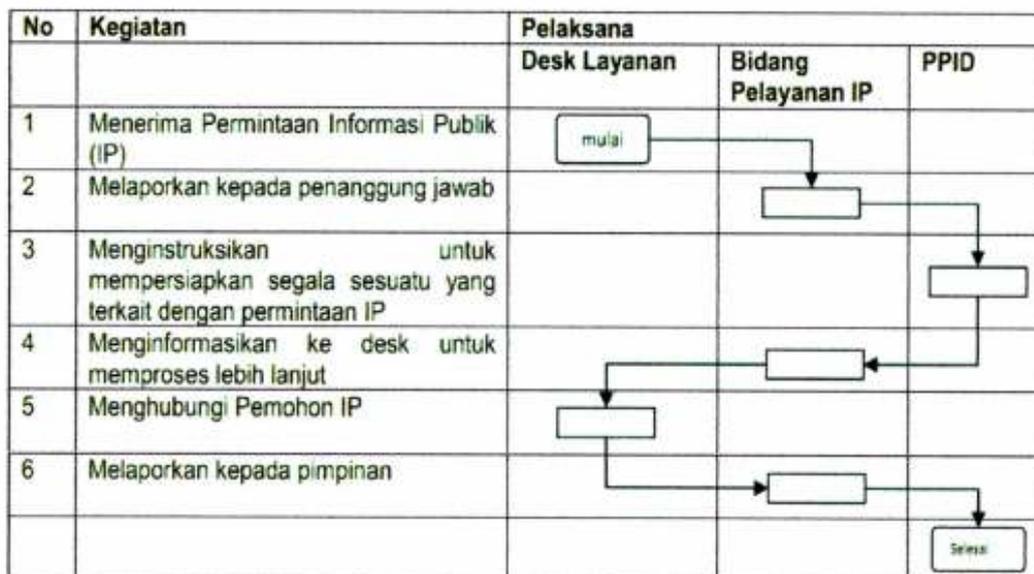
Jumat : 09.00-15.00 WIB

Istirahat : 11.00-13.00 WIB

c. Mekanisme Permohonan Informasi Publik

1. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan foto copy KTP pemohon dan pengguna informasi yg masih berlaku
2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi kepada pemohon informasi publik.
3. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah di tanda tangani oleh pemohon informasi publik.
4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yg di minta oleh pemohon/pengguna informasi jika informasi yang di minta masuk dalam kategori di kecualikan.PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada Pengguna Informasi Publik.
6. Membukukan dan mencatat.

Bagan alur mekanisme pelayanan informasi publik



d. Jangka Waktu Penyelesaian

- 1) Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik di lakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah di tentukan
- 2) Waktu penyelesaian di laksanakan paling lambta 10 (sepuluh) hari kerja sejak di terima permintaan,PPID akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang di minta berada dibawah penguasaannya atau tidak,Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- 3) Penyampaia,pendistribusian atau penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dapat di lakukan secara / melalui langsung, website atau email,telepon atau fax,dan jasa pos.
- 4) Jika permohonan informasi diterima,maka dalam surat pemberitahuan juga di cantumkan materi informasi yang di berikan,format informasi,apakah dalam bentuk softcopy atau data tertulis ,serta biaya apabila di butuhkan untuk keperluan penggandaan atau perekaman.Apabila permintaan informasi publik di tolak,maka dalam surat pemberitahuan di cantumkan alasan penolakan berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

e. Biaya/Tarif

PPID menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya),sedangkan untuk penggandaan atau perekaman pemohon / pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan dengan foto copy sendiri dengan di dampingin oleh petugas PPID atau menyediakan CD/DVD kosong atau Flasdisk untuk perekaman data dan informasi.

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

1. Daftar rekapitulasi permohonan pelayanan publik tahun 2019 adalah sebagai berikut

| No | Bulan | Jumlah Pemohon Yang Dipenuhi | Jumlah Pemohon Yang Ditolak | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Januari | - | - | |
| 2. | Pebruari | 4 | - | |
| 3. | Maret | 4 | - | |
| 4. | April | 4 | - | |
| 5. | Mei | 2 | - | |
| 6. | Juni | 1 | - | |
| 7. | Juli | 1 | - | |
| 8. | Agustus | - | - | |
| 9. | September | 4 | - | |
| 10. | Oktober | 1 | - | |
| 11. | Nopember | - | - | |
| 12. | Desember | - | - | |

2. Daftar Pengajuan permohonan pelayanan informasi publik kepada PPID KPU Kota Probolinggo pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

| NO | TANGGAL | DARI | PERIHAL |
|----|-----------------|--------------------------|---|
| 1 | 10 Januari 2020 | PPP | Permohonan Data Hasil Pileg Tahun 2019 |
| 2 | 27 April 2020 | DPC PDI-Perjuangan | Permintaan hasil perolehan suara dan kursi PDI Perjuangan Legislatif Tahun 2019 |
| 3 | 23 April 2020 | DPC PPP | Permohonan hasil rekapitulasi Pemilu 2019 |
| 4 | 29 April 2020 | PKB | Permohonan autentifikasi perolehan suara dan kursi |
| 5 | 15 Mei 2020 | Partai Nasdem | Permohonan formulir DAA.1 hasil Pemilu 2019 di Kota Probolinggo |
| 6 | 16 Mei 2020 | PDIP | Permohonan hasil perolehan suara dan kursi PDIP Pileg Tahun 2019 |
| 7 | 13 Mei 2020 | Setda | Permintaan data statistik sektoral Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2019 |
| 8 | 15 Juni 2020 | PKS | Permohonan penetapan suara PKS Tahun 2019 |
| 9 | 3 Agustus 2020 | Bawaslu Kota Probolinggo | Permintaan Data |

| NO | TANGGAL | DARI | PERIHAL |
|----|-----------------|------------------|---|
| 10 | 2 November 2020 | PDI Perjuangan - | Permintaan hasil perolehan suara dan kursi PDI Perjuangan Legislatif Tahun 2019 |

3. Daftar rekapitulasi permohonan pelayanan informasi publik tahun 2020 adalah sebagai berikut.

| No. | Bulan | Jumlah Pemohon yang dipenuhi | Jumlah Pemohon yang ditolak | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Januari | 1 | - | Selesai |
| 2. | Februari | - | - | Selesai |
| 3. | Maret | - | - | Selesai |
| 4. | April | 3 | - | Selesai |
| 5. | Mei | 3 | - | Selesai |
| 6. | Juni | 1 | - | Selesai |
| 7. | Juli | - | - | Selesai |
| 8. | Agustus | 1 | - | Selesai |
| 9. | September | - | - | Selesai |
| 10. | Oktober | - | - | Selesai |
| 11. | November | 1 | - | Selesai |
| 12. | Desember | - | - | Selesai |

4. Daftar Pengajuan permohonan pelayanan informasi publik kepada PPID KPU Kota Probolinggo pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.

| NO | TANGGAL PERMOHONAN | TANGGAL PEMENUHAN | DARI | PERIHAL |
|----|--------------------|-------------------|--------------------|---|
| 1 | 6 Januari 2021 | 11 Januari 2021 | KPU Provinsi Jatim | Daftar usulan kelompok kerja Pengelola Laporan Keuangan Unit Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Tingkat satker KPU Kab/Kota TA 2021 |
| 2 | 6 Januari 2021 | 13 Januari 2021 | KPU Provinsi Jatim | Permintaan Data Pemetaan Belanja Pegawai TA 2021 |
| 3 | 11 Januari 2021 | 15 Januari 2021 | KPU RI | Penyampaian Kuisisioner Pengawasan |

| NO | TANGGAL PERMOHONAN | TANGGAL PEMENUHAN | DARI | PERIHAL |
|-----------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4 | 11 Januari 2021 | 11 Januari 2021 | PDIP | Permintaan hasil perolehan suara dan kursi PDIP Legislatif Tahun 2019 |
| 5 | 18 Januari 2021 | 28 Januari 2021 | KPU RI | Prosedur pengusulan Satyalancana Karya Satya Tahun 2021 |
| 6 | 18 Januari 2021 | 20 Januari 2021 | KPPN Bondowoso | Pendataan Bendahara belum tersertifikasi pada satker pengelola APBN Tahun 2021 |
| 7 | 21 Januari 2021 | 25 Januari 2021 | Setda Kota Probolinggo | Permohonan data Indikator dan Sub Indikator TPB/SDG'S kota Probolinggo Tahun 2016-2020 |
| 8 | 28 Januari 2021 | 28 Januari 2021 | KPU RI | Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekjend KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kab/Kota Tahun 2021 |
| 9 | 1 Februari 2021 | 2 Februari 2021 | DPD Partai Nasdem | Permohonan Legalisir surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara sah Parpol |
| 10 | 2 Februari 2021 | 2 Februari 2021 | DPD Partai Golkar | Permohonan data hasil perolehan Pemilu 2019 |
| 11 | 3 Februari 2021 | 11 Februari 2021 | KPU RI | Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar LKPP Tahun 2021 |
| 12 | 4 Februari 2021 | 4 Februari 2021 | DPC PPP | Permohonan hasil rekapitulasi Pemilu 2019 |
| 13 | 4 Februari 2021 | 4 Februari 2021 | DPC Partai Gerindra | Permohonan surat keterangan perolehan suara dan kursi pada Pileg 2019 |
| 14 | 5 Februari 2021 | 5 Februari 2021 | DPD PKS | Permohonan surat keterangan autentifikasi perolehan suara |
| 15 | 5 Februari 2021 | 10 Februari 2021 | KPU RI | Pendaftaran pelatihan Bendahara pengeluaran dengan metode E-Learning Tahun 2021 |
| 16 | 8 Februari 2021 | 10 februari 2021 | DPC PKB | Permohonan autentifikasi perolehan suara dan kursi |
| 17 | 18 Februari 2021 | 22 Februari 2021 | LKPP | Permohonan partisipasi kuesioner bela pengadaan |
| 18 | 18 Februari 2021 | 23 Februari 2021 | KPU RI | Permintaan data tim BPK |
| 19 | 22 Februari 2021 | 27 Februari 2021 | KPKN dan L Jember | Penyampaian laporan tahunan pengawasan dan pengembalian BMN TA 2020 |
| 20 | 1 Maret 2021 | 5 Maret 2021 | BKPSDM Kota Probolinggo | Permohonan data kepesertaan PPNPN BPJS Kesehatan bagi pegawai Non-ASN di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo |

| NO | TANGGAL PERMOHONAN | TANGGAL PEMENUHAN | DARI | PERIHAL |
|-----------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 21 | 4 Maret 2021 | 10 Maret 2021 | KPU Provinsi Jawa Timur | Pelaporan kartu kendali SPIP KPU Kab/Kota Tahun 2020 |
| 22 | 9 Maret 2021 | 9 Maret 2021 | KPU Provinsi Jawa Timur | Permohonan data Ijin Belajar dan Pencantuman Gelar |
| 23 | 15 Maret 2021 | 16 Maret 2021 | KPU Provinsi Jawa Timur | Pemutakhiran Data Anggota KPU Provinsi, Kab/Kota |
| 24 | 17 Maret 2021 | 9 April 2021 | DPC PPP | Permohonan data hasil penghitungan suara model DAA-I DPRD Pemilu Tahun 2019 |
| 25 | 22 Maret 2021 | 24 Maret 2021 | KPU Provinsi Jawa Timur | Identifikasi dan verifikasi data BMN berupa tanah |
| 26 | 23 Maret 2021 | 25 Maret 2021 | KPU RI | Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) |
| 27 | 24 Maret 2021 | 26 Maret 2021 | KPU RI | Ujian Alih Status bagi PNS DPK pada Sekretariat KPU Provinsi, KPU Kab/kota Tahun 2021 |
| 28 | 25 Maret 2021 | 27 Maret 2021 | KPU RI | Permintaan Data Pengadaan Barang dan Jasa |
| 29 | 07 April 2021 | 8 April 2021 | KPU Provinsi Jawa Timur | Pendataan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai |
| 30 | 09 April 2021 | 9 April 2021 | DPC PPP | Permohonan Data Hasil Penghitungan Suara Model DAA-1 DPRD kab/kota Pemilu 2019 |
| 31 | 12 April 2021 | 15 April 2021 | KPU Provinsi Jawa Timur | Penyampaian laporan Kartu Kendali Bulanan dan Laporan Triwulan SPIP KPU Kab/Kota |
| 32 | 15 April 2021 | 18 April 2021 | KPU Provinsi Jawa Timur | Permintaan usulan kebutuhan ASN Tahun 2022 |
| 33 | 19 April 2021 | 22 April 2021 | KPU Provinsi Jawa Timur | Penyampaian kekurangan data kartu kendali SPIP KPU Kab/Kota |
| 34 | 26 April 2021 | 26 April 2021 | KPU Provinsi Jawa Timur | Penyusunan dan pelaporan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2019 dan Tahun 2020 |
| 35 | 26 April 2021 | 28 April 2021 | KPU Provinsi Jawa Timur | Pemutakhiran data PNS DPK pada KPU Kab/Kota |
| 36 | 26 April 2021 | 29 April 2021 | KPU RI | Penyampaian dokumen alih status Tahap I |

| NO | TANGGAL PERMOHONAN | TANGGAL PEMENUHAN | DARI | PERIHAL |
|-----------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 37 | 26 April 2021 | 29 April 2021 | KPU RI | Pemberkasan Dokumen Alih satatus Tahap 2 bagi PNS DPK kelulusan Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2020 |
| 38 | 26 April 2021 | 27 April 2021 | DPC Demokrat | Hasil Perolehan suara dan Kursi partai Demokrat Kota Probolinggo pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 |
| 39 | 28 April 2021 | 30 April 2021 | DPD Partai Nasdem | Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik |
| 40 | 29 April 2021 | 30 April 2021 | Partai Demokrat | Bantuan Keuangan Partai Politik |
| 41 | 29 April 2021 | 2 Mei 2021 | KPU Provinsi Jawa Timur | Pencermatan Belanja Pegawai Satker KPU Se- Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 |
| 42 | 29 April 2021 | 2 Mei 2021 | KPU Provinsi Jawa Timur | Pemberkasan dokumen Tahap II bagi PNS DPK kelulusan Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2020 |
| 43 | 3 Mei 2021 | 5 Mei 2021 | KPU RI | Pemutakhiran BMN |
| 44 | 27 Mei 2021 | 30 Mei 2021 | DPD Partai Golkar | Permohonan bantuan dana Partai |
| 45 | 20 Mei 2021 | 23 Mei 2021 | KPU RI | Permintaan data admin dalam sistem informasi pegawai sekretariat KPU Provinsi, Kab/Kota |
| 46 | 2 Juni 2021 | 9 Juni 2021 | KPPN Bondowoso | Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Februari 2021 |
| 47 | 4 Juni 2021 | 7 Juni 2021 | KPU Provinsi Jawa Timur | Permintaan Data |
| 48 | 10 Juni 2021 | 11 Juni 2021 | KPU RI | Pengajuan nama tim uji kesesuaian Sekretaris KPU Kab/Kota Tahun 2021 |
| 49 | 14 Juni 2021 | 16 Juni 2021 | Setda Kota Probolinggo | Usulan estimasi biaya pelaksanaan Pemilu pada Kota Probolinggo Tahun 2024 |
| 50 | 16 Juni 2021 | 17 Juni 2021 | BKPSDM Kota Probolinggo | Pelaksanaan Proses Penyelesaian Kenaikan Pangkat Periode 1 Oktober 2021 |
| 51 | 21 Juni 2021 | 25 Juni 2021 | KPU RI | Pengisian formulir dan permintaan data terkait pengadaan barang / jasa Triwulan II Tahun 2021 |
| 52 | 23 Juni 2021 | 25 Juni 2021 | KPU Provinsi Jawa Timur | Pendataan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Sekretariat KPU Kab/kota se Jatim |
| 53 | 30 Juni 2021 | 6 Juli 2021 | KPU RI | Permintaan data capaian output pada aplikasi E-Monev dan aplikasi SMART |

| NO | TANGGAL PERMOHONAN | TANGGAL PEMENUHAN | DARI | PERIHAL |
|----|--------------------|-------------------|-------------------------|---|
| | | | | Triwulan II Tahun Anggaran 2021 |
| 54 | 2 Juli 2021 | 5 Juli 2021 | KPU RI | Alih Status/Pindah Instansi PNS dipekerjakan pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kab/Kota menjadi PNS Sekjend KPU |
| 55 | 2 Juli 2021 | 5 Juli 2021 | KPU Prov Jatim | Alih Status/Pindah Instansi |
| 56 | 5 Juli 2021 | 8 Juli 2021 | KPU Prov Jatim | Laporan tindak lanjut SE 11 Tahun 2021 |
| 57 | 21 Juli 2021 | 28 Juli 2021 | DPC Partai Gerindra | Permohonan DA 1 Pileg 2019 |
| 58 | 26 Juli 2021 | 3 Agustus 2021 | KPU RI | Permintaan lanjutan inventarisasi kegiatan kajian, riset, dan buku pada Tahun 2019, s.d 2021 serta identifikasi kebutuhan kegiatan kajian, riset dan buku pada Tahun 2021 |
| 59 | 27 Juli 2021 | 28 Juli 2021 | KPU RI | Pengusulan nama verifikator dan approval pemutakhiran data mandiri BKN RI |
| 60 | 2 Agustus 2021 | 18 Agustus 2021 | Partai Golkar | Permohonan data hasil Pemilu Tahun 2019 |
| 61 | 6 Agustus 2021 | 9 Agustus 2021 | DPC Partai Gerindra | Permohonan surat keterangan perolehan suara dan peringkat suara sah Partai Gerindra Dapil 2 |
| 62 | 12 Agustus 2021 | 21 September 2021 | KPU RI | Pemberian Penghargaan bagi PNS berprestasi di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU Kab/Kota |
| 63 | 12 Agustus 2021 | 16 Agustus 2021 | KPU Provinsi Jawa Timur | Kenaikan Pangkat PNS Sekjend KPU Periode 1 Oktober 2021 |
| 64 | 16 Agustus 2021 | 18 Agustus 2021 | KPU RI | Pembentukan Tim Uji Kesesuaian Pengisian Jabatan Calon Sekretaris KPU/KIP Kab/Kota Tahun 2021 |
| 65 | 19 Agustus 2021 | 22 Agustus 2021 | KPU RI | Surat pernyataan bersedia mengabdikan pada KPU |
| 66 | 20 Agustus 2021 | 25 Agustus 2021 | KPU RI | Pendataan wilayah administrasi untuk persiapan Penataan Dapil |
| 67 | 20 Agustus 2021 | 27 Agustus 2021 | KPU RI | Input data belanja pegawai dan belanja operasional serta pemeliharaan perkantoran TA 2022 |
| 68 | 25 Agustus 2021 | 9 September 2021 | KPU RI | Penyampaian rencana kebutuhan BMN TA 2023 |

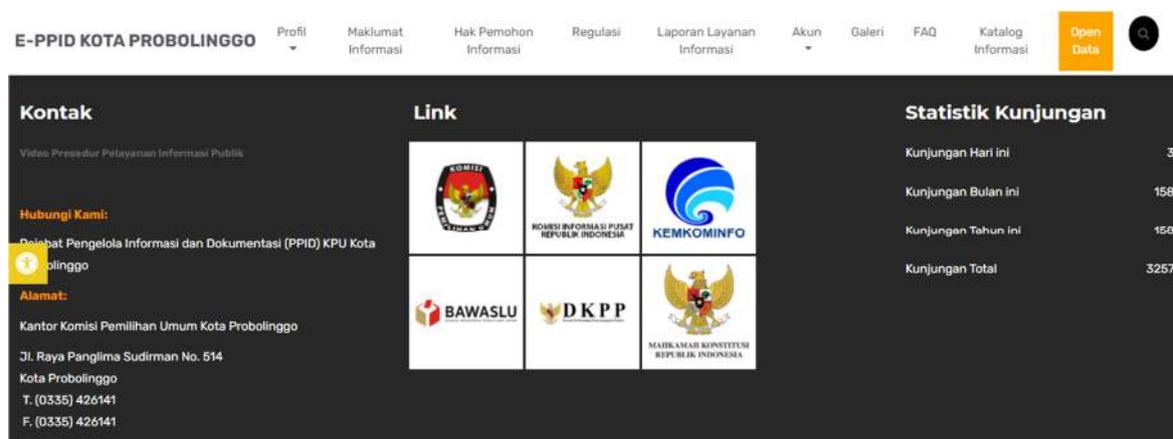
| NO | TANGGAL PERMOHONAN | TANGGAL PEMENUHAN | DARI | PERIHAL |
|-----------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|---|
| 69 | 16 September 2021 | 20 September 2021 | KPU RI | Permintaan data pengadaan barang/jasa Triwulan III |
| 70 | 21 September 2021 | 22 September 2021 | Satpol PP Kota Probolinggo | Permintaan data Partai |
| 71 | 24 September 2021 | 26 September 2021 | DPRD Kota Probolinggo | Permintaan verifikasi persyaratan calon PAW Anggota DPRD Kota Probolinggo |
| 72 | 24 September 2021 | 27 September 2021 | KPU RI | Rencana kebutuhan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan Tahun 2023 |
| 73 | 30 September 2021 | 5 Oktober 2021 | KPU Provinsi Jatim | Permintaan data |
| 74 | 5 Oktober 2021 | 7 Oktober 2021 | DPD Partai Gelora | Permohonan Permintaan data Hasil Pemilu dan Pileg serta DPT Tahun 2019 |
| 75 | 8 Oktober 2021 | 10 Oktober 2021 | DPRD Kota Probolinggo | Permintaan verifikasi persyaratan calon dan rekomendasi PAW Anggota DPRD |
| 76 | 14 Oktober 2021 | 18 Oktober 2021 | KPU Provinsi Jawa Timur | Pelaksanaan rekonsiliasi, penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Triwulan III Tahun 2021 Tingkat Wilayah |
| 77 | 18 Oktober 2021 | 22 Oktober 2021 | KPKNL Jember | Pemutakhiran data BMN berupa tanah pada aplikasi SIMAN |
| 78 | 19 Oktober 2021 | 22 Oktober 2021 | KPU RI | Pembentukan satuan Tugas Unit Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota |
| 79 | 25 Oktober 2021 | 30 Oktober 2021 | KPU Provinsi Jawa Timur | Pembentukan unit penanganan pengaduan masyarakat dan unit pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kab/Kota |
| 80 | 10 November 2021 | 15 November 2021 | KPU Provinsi Jawa Timur | Penetapan harga satuan sewa rumah dinas |
| 81 | 16 November 2021 | 18 November 2021 | KPU Provinsi Jawa Timur | Permintaan data dokumen SAKIP |
| 82 | 16 November 2021 | 22 November 2021 | KPU Provinsi Jawa Timur | Penyampaian laporan tindak lanjut Laporan Keuangan Tahun 2019 |
| 83 | 22 November 2021 | 25 November 2021 | KPU Provinsi Jawa Timur | Pemetaan Belanja Pegawai |
| 84 | 22 November 2021 | 25 November 2021 | KPU Provinsi Jawa Timur | Permintaan LKE RB dan data dukung |

| NO | TANGGAL PERMOHONAN | TANGGAL PEMENUHAN | DARI | PERIHAL |
|-----------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 85 | 25 November 2021 | 28 November 2021 | Setda Kota Probolinggo | Rincian estimasi biaya pelaksanaan Pemilukada Kota Probolinggo Tahun 2024 |
| 86 | 29 November 2021 | 2 Desember 2021 | KPKNL Jember | Penetapan jadwal lelang |
| 87 | 22 Desember 2021 | 25 Desember 2021 | KPU Provinsi Jawa Timur | Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan KPU Tahun 2019 |
| 88 | 24 Desember 2021 | 25 Desember 2021 | KPU Provinsi Jawa Timur | Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan KPU tahun 2019 dan Percepatan Penyelesaian Sisa Rekomendasi |
| 89 | 28 Desember 2021 | 29 Desember 2021 | KPU RI | Surat Pemberitahuan Kebutuhan Pemasangan dan Pemeliharaan APAR Pada Gedung KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia |

5. Daftar rekapitulasi permohonan pelayanan informasi publik tahun 2021 adalah sebagai berikut.

| No. | Bulan | Jumlah Pemohon yang dipenuhi | Jumlah Pemohon yang ditolak | Keterangan |
|------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Januari | 8 | - | Selesai |
| 2. | Februari | 11 | - | Selesai |
| 3. | Maret | 9 | - | Selesai |
| 4. | April | 14 | - | Selesai |
| 5. | Mei | 3 | - | Selesai |
| 6. | Juni | 8 | - | Selesai |
| 7. | Juli | 6 | - | Selesai |
| 8. | Agustus | 9 | - | Selesai |
| 9. | September | 5 | - | Selesai |
| 10. | Oktober | 6 | - | Selesai |
| 11. | November | 7 | - | Selesai |
| 12. | Desember | 3 | - | Selesai |

Pengunjung E-PPID KPU Kota Probolinggo selama Tahun 2021 sebanyak 3257 pengunjung, sebagaimana grafik berikut ini.



D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Selama tahun 2021, PPID Kota Probolinggo dalam hal ini memberikan pelayanan informasi publik, belum pernah terjadi sengketa atau permasalahan.

E. KENDALA-KENDALA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kendala yang dihadapi oleh PPID KPU Kota Probolinggo dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik adalah sebagai berikut.

1. Kurang lengkapnya data dan dokumen arsip pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2004 dan tahun 2009. Hal ini disebabkan sistem pengelolaan arsip di KPU Kota Probolinggo kurang maksimal.
2. Kurangnya sarana prasarana berupa alat kelengkapan PPID seperti printer, meja, dan kursi pelayanan, ATK, dll.
3. Website KPU Kota Probolinggo sudah terintegrasi ke KPU RI.
4. Belum ditetapkannya Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di tingkat KPU Kota Probolinggo.
5. Belum maksimalnya alokasi anggaran operasional kegiatan PPID pada DIPA Tahun 2021, serta minimnya publik yang mengajukan permohonan informasi secara langsung ke kantor KPU Kota Probolinggo.
6. Minimnya pengajuan informasi publik secara elektronik dan belum ada *feed back* dari publik terkait layanan informasi yang diberikan oleh KPU Kota Probolinggo.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Perlu adanya upaya solusi untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama tahun 2021 antara lain sebagai berikut.

1. Semaksimal mungkin berusaha mencari dan mengumpulkan berkas dokumen Pemilu 2004 dan 2009 pada lingkup kantor KPU atau dinas atau instansi lain yang mungkin masih memiliki arsip berkas pada pemilu tersebut.
2. Memenuhi sarana dan prasarana operasional PPID pada tahun 2020. KPU Kota Probolinggo telah mengusulkan alokasi anggaran pada tahun 2022 untuk operasional PPID, tetapi belum teralokasikan pada DIPA Tahun anggaran 2022 untuk pemenuhan sarana dan prasarana.
3. Perlu adanya fitur pelayanan PPID berbasis online pada website KPU Kota Probolinggo.
4. Karena terkait Daftar Informasi Publik yang dikecualikan masih belum ada maka perlu diterbitkan dan disahkan oleh Komisioner KPU Kota Probolinggo.
5. Perlu mendapatkan anggaran Revitalisasi PPID, serta anggaran pelaksanaan sosialisasi agar publik kenal dan dapat mengakses langsung PPID di kantor KPU Kota Probolinggo.
6. Membuat aplikasi berbasis google sheet untuk pelayanan permohonan informasi dimana pemenuhan informasi nantinya bisa dikirimkan melalui email pemohon informasi, serta membuat palikasi google sheet terkait survey layanan publik.

G. PENUTUP

Laporan pelaksanaan tugas ini menyajikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh PPID KPU Kota Probolinggo selama Tahun 2021. Ke depan PPID KPU Kota Probolinggo dituntut untuk melaksanakan kegiatan pelayanan PPID semaksimal mungkin sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPU dalam rangka meningkatkan kualitas dan pengelolaan PPID Kota Probolinggo.

Demikian laporan ini dibuat sebagai salah satu pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID KPU Kota Probolinggo selama tahun 2022. Selanjutnya untuk dapat dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Probolinggo, 11 Januari 2022
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota
Probolinggo

